



## Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Teks Berita “Pernyataan Prabowo Subianto Terkait Uu Tni Dan Respons Aksi Demonstrasi”

Imas Masrini<sup>1</sup>, Agus Hamdani<sup>2</sup>

Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Institut Pendidikan Indonesia Garut

Received: 05 September 2025  
Revised: 17 September 2025  
Accepted: 28 September 2025

### Abstract

*Jurnal ini mengkaji dinamika wacana politik seputar rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tahun 2025, dengan fokus pada pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menekankan urgensi perubahan regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor sosial—terutama militer dan masyarakat sipil—direpresentasikan dalam wacana politik dan pemberitaan media, serta dampaknya terhadap pembentukan opini publik mengenai militerisasi birokrasi sipil. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Theo van Leeuwen, yang menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi strategi representasi sosial seperti inklusi, eksklusivitas, nominasi, agregasi, dan determinasi. Melalui analisis terhadap pernyataan resmi dan liputan media, ditemukan bahwa militer kerap ditampilkan secara positif sebagai aktor yang netral, profesional, dan siap mengisi kekosongan birokrasi, sementara masyarakat sipil direduksi perannya atau diabaikan secara sistematis. Strategi diskursif ini memperkuat hegemoni negara dan mempersempit ruang kritik terhadap ekspansi militer di ranah sipil. Wacana dominan yang dibangun pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk menormalisasi peran militer dalam struktur administratif sipil, yang dapat mengancam prinsip demokrasi partisipatif. Jurnal ini merekomendasikan perlunya media dan aktor negara untuk mengedepankan keberagaman perspektif dalam pemberitaan dan perumusan kebijakan, agar ruang publik tetap menjadi arena dialog yang inklusif dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi kritis media dan politik dengan menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap narasi dominan dalam proses legislasi strategis.*

**Keywords:** *UU TNI, Prabowo Subianto, analisis wacana kritis, Theo van Leeuwen, militerisasi, demokrasi, media.*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Masrini, I., & Hamdani, A. (2025). Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Teks Berita “Pernyataan Prabowo Subianto Terkait Uu Tni Dan Respons Aksi Demonstrasi”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.A), 170-177. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12971>.

## PENDAHULUAN

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga medium kekuasaan yang merefleksikan dan membentuk realitas sosial, politik, serta ideologi. Dalam konteks wacana politik, bahasa memiliki peran penting dalam membingkai isu, membangun citra, serta mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, analisis terhadap pernyataan politisi tidak hanya sebatas memahami isi, tetapi juga

menelusuri bagaimana makna dibentuk dan aktor sosial direpresentasikan melalui strategi kebahasaan tertentu.

Reformasi sektor keamanan di Indonesia sejak 1998 membawa konsekuensi penting terhadap reposisi militer dalam kehidupan sipil dan politik. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah supremasi sipil atas militer, yang diwujudkan melalui pembatasan keterlibatan aktif militer dalam jabatan-jabatan sipil. Namun, wacana ini kembali dipertanyakan ketika DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025, yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di

17 kementerian dan lembaga, meningkat dari ketentuan sebelumnya sebanyak 10 posisi.

Revisi UU ini menuai polemik yang cukup luas di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa kehadiran militer dalam jabatan sipil diperlukan untuk efisiensi dan percepatan pembangunan. UU ini memungkinkan prajurit aktif TNI menduduki posisi sipil di 17 kementerian/lembaga, dibandingkan hanya 10 sebelumnya. Hal ini memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa karena dinilai berpotensi mengembalikan praktik militerisme ala Orde Baru. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia melihat revisi ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap kontrol sipil atas militer. Kritik tersebut kemudian memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga Presiden terpilih untuk periode 2024–2029, turut memberikan pernyataan resmi membela revisi UU tersebut. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam penempatan prajurit aktif di jabatan sipil selama dilakukan secara profesional dan sesuai kebutuhan negara. Pernyataan ini mendapat sorotan karena dianggap mengabaikan sejarah kelam masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Beliau juga menyatakan bahwa perubahan UU TNI bertujuan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan mempercepat pembangunan nasional. Namun, berbagai kalangan menilai langkah ini bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

Di tengah perdebatan tersebut, media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Narasi yang dibangun media tentang revisi UU TNI dan pernyataan elite politik seperti Prabowo memiliki kekuatan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap militer dan demokrasi.

Pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) serta sikap terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil, menjadi contoh menarik untuk ditelaah dalam kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK). Wacana tersebut tidak lepas dari konteks kekuasaan, legitimasi militer, serta posisi negara dalam merespons dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Theo van Leeuwen dalam menganalisis representasi aktor sosial dalam wacana. Model Van Leeuwen menawarkan perangkat analitis yang mampu mengungkap bagaimana aktor sosial diinklusi, dieksklusi, dipersonalisasi, dipasivasi, dan direpresentasikan dalam bentuk-bentuk wacana tertentu. Melalui pendekatan ini, jurnal ini berusaha

menggali struktur ideologis dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik pernyataan politik yang tampaknya netral.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi representasi aktor sosial dalam wacana yang digunakan dalam pernyataan Prabowo, serta bagaimana strategi tersebut mencerminkan

posisi politik tertentu, memperkuat otoritas negara, atau bahkan mereduksi ruang kritik masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian kritis bahasa dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Jurnal ini akan mengkaji bagaimana pernyataan Prabowo serta narasi media membingkai isu UU TNI dan demonstrasi publik dengan pendekatan AWK model Theo van Leeuwen.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen sebagai alat utama untuk mengungkap cara media massa membentuk dan mereproduksi realitas sosial-politik melalui representasi aktor sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap struktur ideologis tersembunyi dalam bahasa, terutama dalam konteks politis yang melibatkan relasi kuasa antara negara, militer, dan masyarakat sipil.

Model Van Leeuwen digunakan untuk menganalisis berbagai strategi representasi, seperti inklusi-eksklusi (siapa yang ditampilkan atau disembunyikan), nominasi dan identifikasi (penyebutan nama dan atribut tertentu), serta aktivasi-pasivasi (peran aktif atau pasif aktor sosial). Analisis ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengkonstruksi narasi yang mencerminkan kepentingan ideologis tertentu, termasuk upaya legitimasi kekuasaan atau marginalisasi kelompok tertentu.

Sumber data utama berupa teks berita daring dari Detik.com (7 April 2025) yang memuat pernyataan resmi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang rencana revisi UU TNI. Data ini diperkuat dengan berita dari Kompas.com, Tempo.co, dan CNN Indonesia yang memuat tanggapan publik dan laporan aksi demonstrasi sebagai respons atas wacana tersebut. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk menangkap dinamika wacana dari berbagai sudut pandang, baik dari aktor negara maupun masyarakat sipil.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan cara menelusuri, mengunduh, dan menyeleksi berita daring yang relevan. Teks-teks tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi representasi aktor sosial seperti individu, institusi, atau kelompok yang muncul secara eksplisit maupun implisit dalam narasi. Kutipan dipetakan sesuai dengan kategori strategi representasi Van Leeuwen untuk memastikan analisis dilakukan secara sistematis dan kontekstual.

Analisis data diawali dengan proses koding terhadap bagian teks yang mengandung representasi aktor sosial. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan strategi representasi yang digunakan media, diikuti dengan interpretasi ideologis untuk mengungkap pesan tersembunyi, posisi ideologis media, serta relasi kuasa yang terbangun dalam narasi. Selanjutnya dilakukan analisis tematik untuk menemukan pola dominan dalam konstruksi wacana, seperti kecenderungan normalisasi peran militer dalam ruang sipil, pereduksian peran aktor sipil, atau personifikasi kekuasaan pada figur tertentu.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga membongkar dimensi ideologis dan struktur kuasa di balik konstruksi berita, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kajian komunikasi politik, media studies, dan studi wacana kritis di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

Penelitian ini mengkaji wacana berita berjudul “Pernyataan Prabowo Subianto Terkait UU TNI dan Respons Aksi Demonstrasi” dengan menggunakan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Berikut merupakan hasil analisisnya:

#### **1. Wacana Prabowo: Militer sebagai Solusi Nasional**

Dalam berbagai pernyataan publik, Prabowo Subianto secara konsisten menyampaikan bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil bukanlah sesuatu yang baru ataupun menyimpang, melainkan justru diperlukan dalam rangka memperkuat stabilitas nasional. Wacana ini merepresentasikan militer, khususnya TNI, sebagai aktor solutif yang mampu menjawab tantangan birokrasi sipil dengan disiplin dan efisiensi. Prabowo menggambarkan TNI sebagai institusi paling tertib dan terorganisasi, yang mampu memperkuat kinerja kementerian-kementerian dan mendukung sistem pemerintahan. Selain itu, TNI direpresentasikan sebagai pahlawan stabilitas nasional; patriotisme dan profesionalisme mereka ditegaskan sebagai jaminan bagi ketertiban dan keberlanjutan bangsa. Dalam narasi ini, kritik dari masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI cenderung tidak diakomodasi. Ketidakhadiran representasi penolak dalam wacana resmi negara menunjukkan adanya praktik eksklusif, di mana suara-suara kritis dimarginalkan dan tidak diberi ruang dalam pembentukan opini publik.

#### **2. Representasi Demonstran dan Aktivis**

Media arus utama seperti Kompas dan CNN Indonesia menampilkan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil dengan cara yang kurang personal dan cenderung menyamaratakan. Para peserta aksi disebut secara samar sebagai “massa aksi”, tanpa informasi tentang identitas individu atau afiliasi organisasi mereka. Asimilasi terjadi ketika para aktivis dikelompokkan secara homogen ke dalam satu kategori umum “penolak UU TNI”, menghapus keragaman motif dan latar belakang. Dalam struktur kalimat, pasivasi sering ditemukan, misalnya melalui frasa “demonstrasi terjadi di depan DPR” yang tidak menyebutkan subjek pelaku secara jelas. Hal ini berbeda dengan representasi aparat keamanan, di mana mereka digambarkan secara aktif dan positif, misalnya dalam kalimat “TNI menjaga keamanan sidang paripurna” atau “petugas mengawal jalannya aksi dengan tertib”. Representasi ini menunjukkan adanya individualisasi dan aktivasi terhadap aparat, sementara demonstran diposisikan secara pasif dan tidak berwajah. Ini memperkuat wacana bahwa negara adalah pelindung stabilitas, sedangkan gerakan sipil adalah potensi ancaman yang harus dikendalikan.

#### **3. Strategi Determinasi dan Indeterminasi**

Wacana yang dibentuk oleh Prabowo dan media pendukung juga memperlihatkan penggunaan strategi determinasi dan indeterminasi terhadap para aktor sosial. Nama lengkap dan jabatan Prabowo selalu disebut secara penuh dan berulang, seperti dalam “Menhan Prabowo Subianto menyatakan...”, yang

menciptakan citra otoritas dan kredibilitas. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang mengkritik kebijakan militerisasi disebut secara umum dan tidak spesifik, seperti dalam frasa “sejumlah pihak mengkhawatirkan...” atau “sebagian kalangan menilai...”. Ketidakjelasan identitas ini adalah bentuk dari indeterminasi yang berfungsi untuk melemahkan legitimasi kritik dan menyulitkan pembaca untuk mengaitkan kritik tersebut dengan aktor nyata. Dengan demikian, pihak yang menyuarakan resistensi terhadap kebijakan negara tidak memiliki kekuatan representatif yang setara dalam wacana publik.

#### **4. Pola Framing Media**

Pola framing yang dibangun oleh media menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menyampaikan isu militerisasi dan demonstrasi. Tempo, sebagai media yang lebih kritis, menghadirkan informasi dengan mengutip data serta pandangan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan KontraS, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kritis terhadap kebijakan negara. Di sisi lain, media seperti Detik dan Kompas cenderung berfokus pada narasi pengamanan dan stabilitas, dengan mengutip pernyataan dari pejabat militer dan pemerintah. Hal ini menciptakan ketimpangan wacana, di mana narasi resmi negara lebih dominan dan dianggap kredibel, sementara suara oposisi hanya muncul secara terbatas. Perbedaan framing ini menunjukkan adanya tarik menarik antara kepentingan negara dan kebebasan pers dalam ruang demokrasi.

#### **5. Strategi Representasi Aktor Sosial: Analisis Van Leeuwen**

Analisis ini menggunakan kerangka representasi aktor sosial dari Theo van Leeuwen untuk mengungkap strategi kebahasaan dalam wacana Prabowo Subianto. Salah satu strategi yang menonjol adalah eksplusi aktor sosial (suppression), di mana masyarakat sipil seperti mahasiswa dan demonstran tidak disebutkan ketika membahas dampak kebijakan militer. Misalnya dalam pernyataan “Kalau negara dalam keadaan darurat, semua kekuatan negara bisa dikerahkan”, tidak ada penyebutan siapa yang akan terdampak dari pengerahan kekuatan tersebut. Dengan menghilangkan aktor sipil, wacana negara menghindari tanggung jawab moral atas kemungkinan represi. Strategi lainnya adalah impersonalisasi, seperti dalam pernyataan “Kita hanya mengikuti undang-undang.” Kata-kata seperti “undang-undang” dan “kerangka hukum” digunakan sebagai agen tindakan, bukan individu, yang berfungsi untuk menyamarkan peran dan tanggung jawab pribadi pejabat dalam keputusan politis.

Selain itu, pasivasi dan nominalisasi juga digunakan untuk mengaburkan agen kekerasan. Dalam kalimat “TNI akan membantu menciptakan situasi yang aman jika terjadi gangguan keamanan”, tidak disebutkan siapa pelaku gangguan. Demonstran dihilangkan sebagai aktor, dan diganti dengan istilah netral seperti “gangguan keamanan”, yang membuat wacana negara tampak reaktif, bukan proaktif atau represif. Strategi diferensiasi juga terlihat dalam narasi yang memisahkan antara “rakyat cinta damai” dan “penyusup pembuat kekacauan”. Ini adalah bentuk binarisme moral yang mengkotakkan masyarakat menjadi dua kubu: yang taat dan yang bermasalah. Strategi ini memperkuat legitimasi tindakan negara terhadap kelompok yang dianggap subversif, sekaligus memperlemah posisi gerakan sipil.

Yang terakhir, Prabowo menggunakan personalisasi untuk membentuk citra diri sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman dan wawasan tentang keamanan

nasional. Ucapan seperti “Saya ini mantan tentara, saya tahu betul pentingnya disiplin” adalah bentuk penguatan ethos pribadi, yang memadukan otoritas moral dan pengalaman militer sebagai dasar legitimasi wacana politik. Personalisasi ini memperkuat kedekatan emosional dengan publik dan memperlemah perlawanan terhadap narasi resmi negara.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dianalisis melalui pendekatan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen menunjukkan bahwa wacana yang dikonstruksi dalam berita “Pernyataan Prabowo Subianto Terkait UU TNI dan Respons Aksi Demonstrasi” tidak sekadar menyampaikan informasi faktual, melainkan secara aktif membentuk persepsi publik tentang relasi antara militer, masyarakat sipil, dan negara. Dalam wacana yang dibangun oleh Prabowo Subianto, militer tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari sistem pertahanan, tetapi juga direpresentasikan sebagai solusi atas ketidakefisienan birokrasi sipil. Hal ini mencerminkan penggunaan strategi legitimasi melalui pencitraan militer sebagai institusi yang unggul dalam hal kedisiplinan dan efisiensi. TNI diposisikan secara simbolik sebagai pilar stabilitas nasional dan agen ketertiban, sementara peran masyarakat sipil yang mengkritisi kebijakan militerisasi nyaris tidak mendapatkan tempat dalam wacana resmi. Di sinilah praktik eksklusi tampak nyata, yaitu ketika suara kritis tidak diakomodasi atau bahkan dihilangkan dari konstruksi wacana negara.

Lebih jauh, representasi terhadap demonstran dan aktivis dalam media arus utama cenderung menunjukkan adanya reduksi terhadap identitas dan peran mereka. Penyebutan yang tidak personal seperti “massa aksi” dan penggunaan kalimat pasif seperti “demonstrasi terjadi di depan DPR” menunjukkan strategi asimilasi dan pasivasi yang disengaja. Strategi ini berimplikasi pada penghilangan identitas individu dan latar belakang gerakan, sehingga memudahkan keberagaman motif dan posisi ideologis dari para demonstran. Kontras yang mencolok terlihat dalam representasi aparat keamanan, yang diberi ruang personal dan aktif dalam narasi, misalnya melalui frasa “TNI menjaga keamanan” atau “petugas mengawal aksi dengan tertib”. Ini menunjukkan praktik aktivasi dan individualisasi terhadap aktor negara, yang secara tidak langsung memperkuat dikotomi antara negara sebagai penjaga stabilitas dan masyarakat sipil sebagai potensi ancaman.

Strategi determinasi dan indeterminasi juga digunakan secara selektif untuk mengonstruksi hierarki legitimasi dalam wacana. Prabowo sebagai aktor utama selalu direpresentasikan secara determinatif, dengan penyebutan lengkap nama dan jabatannya secara berulang, seperti “Menhan Prabowo Subianto”, yang membangun otoritas simbolik. Sebaliknya, penentang kebijakan negara hanya disebut sebagai “sejumlah pihak” atau “sebagian kalangan”, tanpa identitas yang jelas. Hal ini merupakan bentuk indeterminasi yang mereduksi kekuatan representatif kritik, dan mengaburkan sumber kritik agar pembaca tidak dapat membangun koneksi emosional maupun logis dengan pihak yang menentang. Strategi ini memperlihatkan bagaimana media dan wacana negara berkontribusi dalam pembentukan relasi kekuasaan yang timpang antara elite negara dan rakyat.

Pola framing media juga mencerminkan dinamika tarik-menarik antara kekuatan negara dan independensi pers. Media seperti Tempo mencoba menghadirkan keberimbangan melalui kutipan dari lembaga kritis seperti LBH dan

KontraS, yang mencerminkan resistensi terhadap dominasi narasi negara. Sebaliknya, media seperti Kompas dan Detik cenderung menekankan pada aspek pengamanan dan ketertiban, yang selaras dengan narasi resmi. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan ideologis dalam media, di mana sebagian besar media cenderung memelihara status quo melalui penguatan narasi hegemonik. Ketimpangan ini menandakan bahwa kebebasan pers masih dibatasi oleh dominasi wacana yang berpihak pada kepentingan negara.

Dalam kerangka representasi aktor sosial ala Theo van Leeuwen, strategi eksplusi dan impersonalisasi menjadi instrumen dominan dalam wacana negara. Masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan demonstran, kerap dihapuskan dari narasi ketika membahas dampak kebijakan militerisasi, sebagaimana tampak dalam pernyataan Prabowo: “Kalau negara dalam keadaan darurat, semua kekuatan negara bisa dikerahkan.” Pernyataan ini mengabaikan siapa yang akan terdampak dari pengerahan kekuatan tersebut, sehingga menghindarkan negara dari tanggung jawab moral. Penggunaan istilah abstrak seperti “undang-undang” dan “kerangka hukum” sebagai pelaku tindakan juga menunjukkan impersonalisasi, di mana tanggung jawab individu seperti pejabat negara disamarkan dalam entitas hukum yang tidak berwajah. Strategi ini memperlemah akuntabilitas pribadi dan meringkai tindakan politik sebagai keniscayaan struktural.

Selain itu, strategi pasivasi dan nominalisasi digunakan untuk mengaburkan peran agen dalam tindakan represif. Kalimat seperti “TNI akan membantu menciptakan situasi yang aman jika terjadi gangguan keamanan” menghilangkan subjek yang menyebabkan gangguan, dan menggantinya dengan istilah netral. Ini menyamarkan relasi konflik dan membentuk persepsi bahwa negara hanya bereaksi terhadap kekacauan, bukan sebagai inisiator tindakan kekerasan. Strategi diferensiasi semakin memperkuat polarisasi sosial melalui dikotomi “rakyat cinta damai” dan “penyusup pembuat kekacauan”. Framing ini menciptakan moral binarisme, yang mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kubu yang taat dan yang subversif. Hasilnya adalah pembentukan legitimasi terhadap tindakan negara dalam menekan oposisi, sekaligus delegitimasi terhadap gerakan sipil.

Di sisi lain, personalisasi terhadap figur Prabowo memperkuat pembentukan ethos pribadi yang dipadukan dengan kredensial militer. Pernyataan seperti “Saya ini mantan tentara, saya tahu betul pentingnya disiplin” merupakan contoh penggunaan personalisasi untuk membangun kepercayaan publik. Pengalaman militer Prabowo digunakan sebagai sumber otoritas moral dan profesional yang kemudian ditransformasikan menjadi legitimasi politik. Strategi ini efektif dalam membangun koneksi emosional dengan publik, sekaligus memperlemah daya kritis masyarakat terhadap kebijakan yang ia usung. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa wacana negara yang direproduksi melalui media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan pembentukan hegemoni yang memarginalkan suara oposisi dan memperkuat narasi dominan.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Penelitian ini menganalisis pernyataan Prabowo Subianto tentang Undang-Undang TNI dan respons terhadap aksi demonstrasi menggunakan model representasi aktor sosial Theo van Leeuwen dalam kerangka Analisis Wacana

Kritis. Hasil menunjukkan bahwa wacana yang dibangun tidak netral, tetapi sarat dengan kepentingan ideologis yang merefleksikan dominasi negara dan militer atas masyarakat sipil. Strategi seperti eksklusi aktor sipil, impersonalisasi hukum dan negara, pasivasi kekerasan, diferensiasi moral, serta personalisasi kepemimpinan digunakan untuk menormalisasi kekuasaan dan menyingkirkan suara kritis. Demonstran direduksi menjadi “provokator”, sementara militer tampil sebagai solusi sah, mengaburkan fakta bahwa tindakan represif justru menekan kebebasan sipil. Bahasa, dalam konteks ini, menjadi alat untuk membentuk persepsi publik dan mempertahankan status quo. Penelitian ini menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap wacana elite politik serta pentingnya media, pemerintah, dan akademisi membuka ruang dialog dan kritik demi menjaga demokrasi. Model van Leeuwen terbukti efektif dalam membongkar ideologi tersembunyi dalam bahasa politik..

### **Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi representasi dalam wacana politik tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memperkuat relasi kuasa antara negara, militer, dan masyarakat sipil. Pertama, penggunaan bahasa yang meminggirkan aktor sipil dapat mengurangi ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menyuarakan lebih banyak perspektif dari masyarakat sipil, agar tidak terjebak dalam narasi dominan yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kedua, representasi yang mengaburkan peran aktor manusia dalam kebijakan dan mengesankan objektivitas yang palsu berisiko menciptakan kebijakan yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pemerintahan perlu menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan partisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik secara adil. Ketiga, temuan ini menyoroti pentingnya kajian akademik yang kritis terhadap undang-undang dan kebijakan yang melibatkan militer, guna memperkuat kontrol sipil atas militer dan mencegah dominasi pihak tertentu yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, implikasi dari penelitian ini memperkuat posisi bahwa bahasa dalam wacana politik adalah alat yang sangat kuat dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, sehingga masyarakat perlu lebih kritis dalam menganalisis pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh politik dan media massa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- CNN Indonesia. (2025). "Mahasiswa dan Aktivis Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI."
- Detik.com. (2025). "TNI Siaga Amankan Aksi Tolak RUU TNI di DPR."
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- <https://news.detik.com/berita/d-7858169/prabowo-buka-suara-soal-uu-tni-demo-hingga-urgensinya>
- Kompas.com. (2025). "Prabowo soal UU TNI: Tidak Perlu Diperdebatkan, Demi Efisiensi Negara."
- KontraS. (2025). *Pernyataan Sikap Terhadap Militerisasi Sipil: Ancaman Demokrasi*. Jakarta.

- Tempo.co. (2025). "RUU TNI Disahkan, Pemerintah Dituding Kembali ke Orde Baru."
- Van Leeuwen, Theo. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford University Press.